

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

(Studi Di Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaaan Dalam Ilmu

Hukum

Oleh :

GALIH VESPANTORO

NIM. 115010107113035



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KEDIRI

2015

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

(Studi Di Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)

GALIH VESPANTORO, IBNU SAM WIDODO, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, April 2015, email : galihvespantoro@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Implementasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Permasalahan yang terjadi terkait dengan Implementasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah saat ini mayoritas penduduk Desa Kras masih memiliki tingkat kehidupan yang rendah atau belum bisa dikatakan sejahtera. Rata-rata penduduk Desa Kras tersebut bermata pencaharian sebagai buruh tani selain itu juga masih banyaknya rumah tangga miskin yang ada di wilayah tersebut. Sehingga memerlukan suatu program baik berupa program bantuan fisik maupun non fisik. Dengan adanya kedua program itu nantinya di harapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat dan bisa mengurangi jumlah rumah tangga miskin yang berada di wilayah tersebut

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena bertujuan untuk memahami dengan benar penerapan pengelolaan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan *interdisipliner* yang menggunakan konsep dan teori dari berbagai ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum.

Berdasarkan implementasi pengelolaan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditarik kesimpulan dengan melakukan suatu pembangunan desa dan pembangunan Desa tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu selama lima tahun kedepan serta harus dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan gambaran dari seluruh program nyata yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Kras. Selain itu pemerintah Desa Kras harus mempunyai prioritas program yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran RPJMDes yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kras (RKPDDes).

Kata kunci : Implementasi, Sumber Pendapatan Desa, Kesejahteraan Masyarakat Desa

SOURCE REVENUE MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF VILLAGE TO IMPROVE WELFARE VILLAGE

(Studies In the Village of Kras Subdistrict Kediri District)

GALIH VESPANTORO, IBNU SAM WIDODO, Constitutional Law, Faculty of Law

Brawijaya of University, April 2015, email : galihvespantoro@yahoo.co.id

Abstract

In writing this essay discussed about the implementation of Rural Resources Management Revenue To Increase Public Welfare Village. The problems that occur related to the implementation of Rural Resources Management Revenue To Increase Public Welfare Village is currently the majority of the villagers Kras still have a low level of life or can not say prosperous. The average resident of the village of Kras livelihood as farm laborers while also still many poor households in the region. So it takes a good program in the form of physical assistance programs and non-physical. With the two programs is expected to improve their standard of living and welfare of the community and could reduce the number of poor households who are in the area

This type of research used in this study is juridical empirical, as it aims to understand properly the implementation of the management of the village's source of income meningkatkan rural welfare. The approach used in this research is a sociological juridical ie an interdisciplinary approach that uses concepts and theories from various sciences are combined and coupled to assess the phenomenon of law

Based on the implementation of the management of rural income sources to improve the welfare of rural communities can be concluded is to do a village development and village development is done in stages within a period of five years and shall be reflected in the Medium Term Development Plan for the Village which is a picture of the entire program proposed by the Government real Kras village. In addition Kras village government should have priority program should be run prior to a period of one year ahead that will be poured In managing sources of income for the welfare of the village there are barriers which include human resources is still lacking, low level of education, level of public awareness in participating in self-help and mutual cooperation of the funds are still lacking, while efforts to overcome the hambata is debriefing in talents, interests and skills to rural communities, organized Packet program to people who have a history of low education, engagement and raise the notion of self-help and mutual aid.

Keywords: Implementation, Source Revenue Village, Village Welfare Society

A. Latar Belakang

Sistem aturan yang pada dasarnya merupakan konsekuensi lebih lanjut atas diaturnya hukum tata negara yaitu mengatur hal ihwal pelaksanaan atas kehidupan bernegara yang meliputi aturan tentang bagaimana para aparat lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan tugas pemerintahan. Hans kelsen mengungkapkan bahwa hukum tata pemerintahan adalah hukum tata negara dalam negara dinamis. Penamaan hukum tata pemerintahan di Indonesia relatif beragam karena berkisar antara hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara serta hukum tata usaha negara.¹

Desa sejak kemerdekaan Republik ini sampai sekarang hanyalah dipandang sebagai bagian terkecil dari wilayah negara. Namun sejatinya desa adalah bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dalam hierarki struktur bernegara. Karena pada hakikatnya tidak ada suatu negara tanpa memiliki bagian-bagian terkecil yang dalam konteks negara Indonesia biasa disebut dengan desa. Sebagaimana pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Dengan logika bahwa negara itu diawali dari manusia, manusia itu kemudian membentuk keluarga masing-masing keluarga itu bersatu dan membentuk desa, desa-desa yang ditinggali keluarga kemudian membentuk kata negara dengan tujuan untuk dapat mempertahankan diri dari serangan musuh. Sehingga dalam tafsir yang sama istilah Republik dan istilah Desa dapat diletakan pada istilah negara atau dengan kata lain dapat pula diartikan bahwa desa adalah cikal bakal atau asal mula negara²

Sedangkan sifat Otonomi Desa adalah merupakan Otonomi asli bulat dan utuh artinya keberadaan Otonomi Desa tersebut merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara. Otonomi Desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk mengatur dan melaksanakan dinamika yang terjadi dalam kehidupannya dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi pihak luar berdasarkan wewenang yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku.³ Kesejahteraan masyarakat desa merupakan satu wujud dari

¹ Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Prinsip Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 77

² Moh Fadli, Dkk **Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif**, Cetakan Kedua, Universitas Brawijaya Press, Malang 2013, hlm 3

³ Sakinah Nadir, **Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa**, Volume 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Makassar, 2013, hlm 89

kemakmuran suatu desa dengan adanya sumber pendapatan desa masyarakat di wilayah pedesaan diharapkan mendapatkan suatu peningkatan taraf hidup untuk menjamin kelangsungan hidupnya menjadi semakin baik melalui pengelolaan yang transparan dari aparatur Pemerintah Desa hal tersebut mempunyai maksud dan tujuan menghindarkan masyarakat pedesaan dari suatu kehidupan yang tidak layak. Berdasarkan pandangan peneliti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Pemerintah Desa Kras harus bisa meningkatkan semua sumber pendapatan desa yang ada di wilayah tersebut.

Menurut data yang diperoleh peneliti saat ini mayoritas penduduk Desa Kras masih memiliki tingkat kehidupan yang rendah atau belum bisa di katakan sejahtera. Rata-rata penduduk Desa Kras tersebut bermata pencarian sebagai buruh tani dengan kondisi ini maka tingkat kehidupan penduduk Desa Kras masih tergolong rendah hal ini tercermin dengan masih banyaknya rumah tangga miskin yang ada di wilayah tersebut. sehingga memerlukan suatu program berupa program bantuan fisik maupun non fisik. Dengan adanya program itu di harapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bisa mengurangi jumlah rumah tangga miskin yang berada di wilayah tersebut.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengelolaan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ?

⁴ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

C. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵ Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti karena mempunyai tujuan untuk memahami Penerapan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan interdisipliner yang menggunakan konsep dan teori dari berbagai ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak disolasi dan konteks-konteks sosial politik, ekonomi, budaya dimana hukum itu berada.⁶ Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dilapangan.⁷ Jenis Data Primer dalam penelitian ini adalah pengalaman dari subyek penelitian yaitu informan dari pihak kantor Kepala Desa Kras yang meliputi Kepala Desa Kras dan Bendahara Desa Kras serta Kepala Keluarga yang berada di Desa Kras dimana hal tersebut berkaitan dengan penelitian Implementasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Teknik memperoleh Data primer dilakukan dengan wawancara karena selama ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap paling efektif karena wawancara dapat betatap muka secara langsung dengan responden Seorang peneliti yang sedang melakukan wawancara harus memperhatikan beberapa hal antara lain : persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan pencatatan hasil wawancara.⁸ Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Kras dan Bendahara Desa Kras serta 35 Kepala Keluarga yang ada di wilayah Desa Kras. Selain itu juga melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian agar data yang diperoleh lebih akurat yaitu dengan metode perolehan data yang mencatat dan memanfaatkan data.⁹ Studi kepustakaan dan dokumentasi diperoleh peneliti melalui sumber pustaka, arsip Pemerintah Desa Kras, peraturan perundang-undangan dan melakukan penelusuran internet. Seluruh studi kepustakaan dan dokumentasi harus berhubungan dengan tema penelitian.

⁵ Imam Koeswahyono Dkk, Sosio **Legal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2013, hlm 109

⁶ *Ibid.*, hlm. 17

⁷ *Ibid.*, hlm. 110

⁸ Suratman Dkk, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ke Satu, Cv Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 127

⁹ Imam Koeswahyono Dkk, *Op.Cit.* hlm 112

D. Pembahasan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pembangunan Desa adalah sebuah proses dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau warga setempat untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari apa yang dirasakan sebelumnya. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, dan kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai sebuah otonomi. Otonomi tersebut bernama otonomi desa yang berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang cenderung bersifat formal. Otonomi Desa lahir dan ada berdasarkan hak asal-usul serta adat istiadat setempat yang sudah dimiliki Desa sejak dulu dan telah melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.¹⁰ Menurut pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.” Kebijakan pembangunan Desa di wilayah Desa Kras menurut Kepala Desa Kras dilakukan dengan strategi sebagai berikut :¹¹

- a. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program Pemerintah Desa dapat terlaksana secara, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Desa
- b. Penataan administrasi yang harus dilakukan pada Pemerintahan Desa
- c. Memberdayakan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
- d. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan
- e. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, saluran air pertanian, sarana keagamaan dan infrastruktur serta mengerakan seluruh masyarakat Desa dalam swadaya untuk mencapai target Pembangunan Desa
- f. Menggali potensi di wilayah Desa untuk menambah Pendapatan Asli Desa untuk menambah dana stimulant Pemerintah Desa dalam pembangunan yang ada di Desa

¹⁰ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Kras Pada Tanggal 4 Februari 2015 Di Kantor Desa Kras

- g. Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di tingkat perekonomian masyarakat
- h. Membantu petani dalam permodalan

Dalam melakukan pembangunan Desa tentunya Pemerintah Desa Kras tidak terlepas dari sumber pendapatan desa dan besaran jumlahnya karena hal tersebut merupakan salah satu faktor Pemerintah Desa Kras dalam melakukan pembangunan Desa khususnya di wilayah Desa Kras tersebut. Arah kebijakan pengelolaan sumber pendapatan desa menurut Bendahara Desa Kras adalah sebagai berikut :¹²

- a. Sumber Pendapatan Desa yang utama bersumber dari tanah kas desa dan dana Pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh Bendahara Desa Kras mengacu kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
- b. Pajak dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa lain sesuai dengan wilayah Dusun tersebut dan kemudian dikumpulkan. Nantinya oleh Sekretaris Desa akan di setorkan ke Bank terdekat yang ada di wilayah Desa Kras.

Selain itu dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kras juga memiliki arah dan kebijakan dalam mengalokasikan dana yang akan digunakan dalam suatu kepentingan tersebut dan semuanya telah diatur dalam APBDes Kras. Arah pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kras menurut Bendahara Desa Kras adalah sebagai berikut :¹³

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kras
- b. Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa dan gaji Kepala RT dan RW
- c. Pengadaan barang dan jasa
- d. Pengadaan inventaris kantor Desa
- e. Biaya operasional Pemerintah Desa Kras
- f. Biaya seragam Kepala Desa dan Perangkat Desa
- g. Pembangunan sarana dan prasarana

2. Berikut ini adalah Potensi dan Masalah Desa Kras Yang Meliputi :

- a. Urusan Pendidikan meliputi :¹⁴

- 1) Masih banyak penduduk desa kras yang buta huruf atau tidak bisa membaca serta mempunyai minat yang rendah dalam pendidikan. Potensi yang akan

¹² Hasil Wawancara Dengan Bendahara Desa Kras, Pada Tanggal 4 Februari 2015 Di Kantor Kepala Desa Kras

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bendahara Desa Kras, Pada Tanggal 4 Februari 2015 di Kantor Kepala Desa Kras

¹⁴ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah melaksanakan program kejar paket dengan tujuan pemberantasan buta huruf dan perkiraan biaya sebesar Rp 10.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020

- 2) Siswa kurang mampu dan berprestasi sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Potensi yang akan dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah memberikan suatu program beasiswa dengan tujuan membantu siswa tersebut untuk berprestasi dan perkiraan biaya sebesar Rp 15.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020
- 3) Perlunya suatu lembaga bimbingan belajar. Potensi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Kras adalah mengadakan suatu bimbingan belajar dengan tujuan agar akses pendidikan lebih dekat dan murah dan perkiraan biaya sebesar Rp 30.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020

b. Urusan Kesehatan meliputi :¹⁵

- 1) Kesehatan itu mahal harganya. Masih banyak rumah tangga miskin di Desa Kras tidak mampu untuk berobat karena tidak memiliki biaya. Potensi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Kras adalah memberikan program BPJS dengan tujuan agar rumah tangga miskin mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi dan perkiraan biaya sebesar Rp 20.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020
- 2) Kebersihan adalah sebagian dari iman. Masih rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh warga Desa Kras khususnya bagi warga kurang mampu dalam menjaga kebersihan diri. Potensi yang akan dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah mengadakan penyuluhan tentang kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat dan perkiraan biaya sebesar Rp 15.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020
- 3) Wabah demam berdarah merupakan salah satu ancaman serius terhadap kesehatan. Potensi yang akan dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah dengan melakukan pengasapan pada sarang nyamuk dengan tujuan mengatisipasi

¹⁵ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

wabah demam berdarah dan perkiraan biaya sebesar Rp 10.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020

c. Urusan Lingkungan Hidup meliputi :¹⁶

- 1) Perlunya budaya tanam pada lahan yang masih kosong disekitar rumah warga. Potensi yang akan di lakukan Pemerintah Desa Kras adalah penyuluhan tentang budaya tanam dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan disekitar rumah untuk tanaman bermanfaat dan perkiraan biaya sebesar Rp 50.000.000 serta pelaksanaan program tersebut adalah pada tahun 2015
- 2) Banyak lahan di Desa Kras yang tidak di dapat manfaatkan. Potensi yang akan di lakukan Pemerintah Desa Kras adalah melakukan penghijauan di wilayah Desa dengan tujuan memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong di Desa Kras dan perkiraan biaya sebesar Rp 7.000.000 serta pelaksanaan program tersebut adalah pada tahun 2015

d. Urusan Sosial dan Budaya meliputi :¹⁷

- 1) Masih ada rumah tangga miskin yang tidak memiliki rumah layak huni. Potensi yang akan di lakukan Pemerintah Desa Kras adalah melakukan bedah rumah dengan tujuan melakukan rehab rumah layak huni untuk rumah tangga miskin guna meningkatkan kualitas tempat tinggal dan perkiraan biaya sebesar Rp 60.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020
- 2) Pengembangan seni dan kreatifitas budaya yang ada di Desa Kras kurang maksimal. Potensi akan yang di lakukan Pemerintah Desa Kras adalah dengan melakukan pengembangan terhadap seni budaya desa dengan tujuan mengembangkan kesenian milik Desa dan perkiraan biaya sebesar Rp 15.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020
- 3) Pentingnya paguyuban. Potensi yang akan dilakukan Pemerintah Desa Kras untu adalah membuat paguyuban kerukunan untuk meningkatkan kerukunan antar warga dan perkiraan biaya sebesar Rp 5.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015-2020

¹⁶ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

¹⁷ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

e. Urusan Pemerintahan Meliputi :¹⁸

- 1) Pemerintahan Desa yang baik merupakan cermin dari kesuksesan suatu Desa. Potensi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kras adalah melakukan pelatihan kepada Perangkat Desa dengan tujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan desa serta tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya dan perkiraan biaya sebesar Rp 35.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015
- 2) Komunikasi Kelembagaan Desa masih sangat kurang dan belum berjalan maksimal. Potensi yang dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah mengadakan pelatihan kepada aparatur kelembagaan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap tugas serta fungsi aparatur Pemerintah Desa dan perkiraan biaya sebesar Rp 15.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015
- 3) Meningkatkan biaya operasional kelembagaan Desa. Potensi yang akan dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah melakukan penambahan biaya operasional kelembagaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa dan perkiraan biaya sebesar Rp 40.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015

f. Urusan Pertanian Meliputi :¹⁹

- 1) Hama tanaman merupakan musuh besar bagi petani apabila dibiarkan hal tersebut dapat berdampak pada hasil pertanian. Potensi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah mengadakan penyuluhan dengan tujuan mengantisipasi hama tanaman milik petani dan perkiraan biaya sebesar Rp 20.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015
- 2) Dibentuknya kelompok tani merupakan salah satu tujuan Pemerintah Desa Kras dalam mengembangkan sektor pertanian. Potensi yang dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah mengadakan pembinaan terhadap kelompok tani dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pertanian dan perkiraan biaya sebesar Rp 15.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015

¹⁸ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

¹⁹ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

g. Urusan Sarana dan Prasarana Meliputi :²⁰

- 1) Salah satu fungsi dari Kantor Kepala Desa Kras adalah sebagai sarana tempat Pemerintahan yang ada di Desa Kras. Potensi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kras adalah menyelesaikan tahap renovasi pembangunan Kantor Kepala Desa Kras dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa yang lebih representatif dan perkiraan biaya sebesar Rp 450.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015
- 2) Saluran air berfungsi untuk memperlancar jalannya air pada saat musim penghujan. Potensi yang dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah dengan pembangunan saluran air atau drainase dengan tujuan mengurangi genangan air pada lingkungan RT 03 dan RW 01 Dusun Kras dan perkiraan biaya sebesar Rp 60.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015
- 3) Saluran air berfungsi untuk memperlancar jalannya air pada saat musim penghujan. Potensi yang dilakukan Pemerintah Desa Kras adalah pembangunan saluran air atau drainase dengan tujuan mengurangi genangan air pada lingkungan RT 03 dan RW 07 Dusun Menang dan perkiraan biaya sebesar Rp 50.000.000 serta pelaksanaan program tersebut pada tahun 2015

E. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pengelolaan sumber pendapatan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di wilayah Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri adalah dengan melakukan suatu pembangunan Desa dan pembangunan Desa tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu selama lima tahun kedepan serta harus dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan gambaran dari seluruh program nyata yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Kras dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu pemerintah Desa Kras harus mempunyai prioritas program yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk jangka waktu satu tahun kedepan dan program tersebut nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kras.

²⁰ Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kras Tahun 2015 Sampai 2020

2. Faktor yang menghambat Pemerintah Desa Kras dalam melakukan pengelolaan sumber pendapatan Desa meliputi
 - a. Akibat cukup jauhnya jarak ke perkotaan maka kualitas sumber daya manusia di wilayah Desa Kras sangat kurang sehingga masyarakat menjadi monoton atau kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap hal yang baru, Masih rendahnya
 - b. Tingkat pendidikan yang di miliki oleh masyarakat desa kras sehingga kurang memahami anjuran yang di sampaikan oleh Pemerintah Desa Rata rata saat ini tingkat pendidikan penduduk Desa Kras didominasi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,
 - c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam swadaya dan gotong royong dalam hal dana masih kurang padahal hal tersebut dapat meningkatkan sumber pendapatan desa. Masyarakat Desa Kras sangat susah apabila diminta bantuan yang berhubungan dengan keuangan tetapi sangat mudah apabila diminta bantuan berhubungan dengan tenaga.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kras dalam mengatasi hambatan tersebut meliputi :
 - a. Memberikan pembekalan kepada masyarakat terutama dalam kemampuan, bakat, minat dan ketrampilan dengan cara mengadakan kegiatan keolahragaan dan kesenian untuk merubah pola pikir dan cara pandang masyarakat di wilayah Desa Kras agar semakin berkembang dan maju sesuai perkembangan zaman.
 - b. Menyelenggarakan program pendidikan kejar paket bagi masyarakat Desa Kras yang memiliki riwayat pendidikan rendah agar lebih memiliki pikiran yang maju serta mempunyai daya saing dalam dunia pendidikan dan kerja
 - c. Usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Kras karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa terhadap swadaya dan gotong royong adalah dengan melakukan pendekatan dan memberikan pengertian tentang arti penting iuran pada masyarakat untuk melakukan pembangunan Desa dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri

F. Daftar Pustaka

Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Prinsip Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Imam Koeswahyono Dkk, **Sosio Legal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2013

Moh Fadli, Dkk **Pembentukan Peraturan Desa Partisipasif**, Cetakan Kedua, Universitas Brawijaya Press, Malang 2013

Suratman Dkk, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ke Satu, Cv Alfabeta, Bandung, 2013

JURNAL

Sakinah Nadir, **Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa**, Volume 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Makassar, 2013

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa